

Peran PKn dalam Menumbuhkan Budaya Politik Siswa di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta

Siti Nurlaela Hidayati dan Triwahyuningsih

Prodi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan

Jln. Pramuka No.42 Sidikan Umbulharjo Yogyakarta

E-mail: ella_hidayati12@yahoo.com dan triweppkn@yahoo.com

ABSTRAK

Sosialisasi politik membutuhkan agen sosialisasi untuk menyampaikan maksudnya. Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Ada empat agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa dan sekolah. Sebagai salah satu agen sosialisasi politik sekolah melalui mata pelajaran PKn bertujuan untuk menyampaikan materi-materi politik kepada peserta didik. Melalui pelajaran PKn diharapkan siswa yang merupakan pemilih pemula bisa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang budaya politik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah guru PKn dan siswa SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dengan cara reduksi data, unitisasi/kategorisasi data, display data dan pengambilan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa PKn sudah berperan dengan baik dalam menumbuhkan budaya politik siswa di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Pentingnya pengetahuan dan pemahaman budaya politik bagi siswa agar mereka sebagai pemilih pemula dapat menyalurkan aspirasi mereka dalam kegiatan politik dengan baik dan benar.

Kata kunci: *PKn, budaya politik, siswa*

PENDAHULUAN

Pemilihan sebagai instrumen demokrasi, keberhasilan pelaksanaannya sangat tergantung pada kualitas dan kuantitas partisipasi pemilih. Untuk dapat berpartisipasi dengan benar, maka pemilih harus memiliki pemahaman yang cukup tentang prosedur teknis pemilihan. Pemahaman yang cukup tentang teknis pemilihan diharapkan akan mampu mendorong kesadaran pemilih untuk berpartisipasi dalam seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan, dan partisipasi tersebut akan dilaksanakan secara benar. Pemilih pemula merupakan seseorang yang berusia 17 tahun pada hari pencoblosan atau yang sudah menikah dan tercatat dalam daftar pemilih tetap. Pemilih pemula dalam setiap even pemilihan umum yang didominasi oleh kalangan pelajar/siswa yang jumlahnya

relatif besar. Pemilih pemula umumnya bersemangat karena akan mencoba kali pertama berpartisipasi. Dan kenyataan sekarang, para pemilih pemula hanya ikut-ikutan untuk memberikan hak pilihnya, bukan karena kesadaran mereka sendiri. Mereka belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang politik sehingga membutuhkan agen-agen yang dapat mensosialisasikan dan memberikan pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang budaya politik atau kegiatan pemilihan.

Sosialisasi politik membutuhkan agen sosialisasi untuk menyampaikan maksudnya. Agen sosialisasi adalah pihak-pihak atau yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Ada empat agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa dan sekolah. Pesan yang disampaikan agen sosialisasi berlainan dan tidak selamanya sejalan satu sama lain. Apa yang diajarkan keluarga berbeda dan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agen sosialisasi yang lain. Misalnya, di sekolah anak-anak diajarkan untuk tidak merokok, minum-minuman keras dan menggunakan obat terlarang (narkoba), tetapi mereka dengan leluasa mempelajarinya dari teman sebaya atau media massa. Proses sosialisasi akan berjalan lancar apabila pesan yang disampaikan oleh agen sosialisasi politik tidak bertentangan atau selayaknya saling mendukung satu sama lain. (Rahman, 2007:246).

Sekolah sebagai agen sosialisasi politik memberikan pengetahuan dibidang politik dan peranan mereka didalamnya. Sekolah melalui pendidikan kewarganegaraan memberikan penjelasan-penjelasan tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik. Pelajaran PKn sebagai pewaris nilai-nilai dan sikap masyarakatnya. Selain itu pemahaman sebagai warga negara juga diberikan melalui pelajaran PKn. Akan tetapi, banyak yang mengatakan bahwa pelajaran PKn membosankan karena terlalu banyak menghafaldari isi buku teks tersebut. Dengan hal seperti itu peserta didik merasa bosan dan kurang berminat untuk mengikuti pelajaran PKn dengan sungguh-sungguh sehingga maksud dan tujuan yang ingin disampaikan belum sampai ke peserta didik dalam mensosialisasika politik melalui pelajaran PKn. Sehingga dibutuhkan cara-cara

mengajar yang kreatif dan inovatif agar apa yang menjadi maksud dan tujuan pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik kepada peserta didik.

Sebagai salah satu agen sosialisasi politik sekolah melalui mata pelajaran PKn bertujuan untuk menyampaikan materi-materi politik kepada peserta didik. Melalui pelajaran PKn diharapkan siswa yang merupakan pemilih pemula bisa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang budaya politik. Sekolah melalui guru PKn dapat mensosialisasikan tentang politik kepada peserta didik. Namun pelajaran PKn terkadang membosankan apabila siswa disuruh untuk menghafal dari isi buku teks pelajaran PKn. Siswa yang kurang suka menghafal akan merasa bosan dan tidak mau mengikuti pelajaran sehingga tujuan pembelajaran PKn tidak tersampaikan. Serta kurangnya minat dan kemauan siswa terhadap pelajaran PKn merupakan salah satu kendala dalam menyampaikan materi budaya politik dengan baik. Sehingga pengetahuan dan pemahaman siswa sebagai pemilih pemula kurang terhadap budaya politik. Sudah seharusnya proses pembelajaran PKn mendidik siswa menjadi manusia yang demokratis sehingga dapat menempatkan dirinya dalam kehidupan berpolitik. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang Peran PKn Dalam Menumbuhkan Budaya Politik Siswa Di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta.

KAJIAN PUSTAKA

1. Tinjauan tentang Pendidikan

Pendidikan pada hakikatnya merupakan interaksi komponen-komponen yang esensial dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Perpaduan antara keharmonisan dan keseimbangan serta interaksi unsur esensial pendidikan, pada tahap operasional sangat menentukan keberhasilan pendidikan. "Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan" (Notoatmodjo, 2003:16).

2. Kurikulum PKn

Pendidikan Kewarganegaraan adalah aspek pendidikan politik yang fokus materinya adalah peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Cholisin, 1994:17).

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membangun dan menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang mencintai tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Melalui pendidikan Kewarganegaraan, rakyat Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang di hadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara konsisten dan berkesinambungan dalam cita-cita dan tujuan nasional seperti yang di gariskan dalam pembukaan UUD 1945.

3. Sosialisasi Politik, Pendidikan Politik dan Budaya Politik

Proses pembentukan budaya politik dilakukan melalui sosialisai politik. Yaitu, proses penerusan atau pewarisan nilai dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Menurut Gabriel A. Almond, sosialisasi politik menunjukkan pada proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleah atau dibentuk dan juga merupakan sarana bagi generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya. (MGMP Pendidikan Kewarganegaraan Kabupaten Sleman, 2009:4). Menurut Almond agen sosialisasi politik ada enam yaitu: keluarga, sekolah, kelompok teman sebaya, pekerja, media massa, dan kontak politik langsung.

Pengertian dari pendidikan politik yang lebih spesifik dapat diambil dari pendapatnya Alfian (1981:235) yang mengatakan bahwa:

pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka rnemahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.

Budaya politik tidak lain daripada orientasi psikologis terhadap objek sosial, dalam hal ini sistem politik kemudian mengalami proses internalisasi kedalam bentuk orientasi yang bersifat *cognitive*, *affective*, dan *evaluative*. (Afan Gaffar, 2006:99).Orientasi yang bersifat kognitif menyangkut pemahaman dan keyakinan individu terhadap sistem politik dan atributnya, seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lain sebagainya. Sementara itu, orientasi yang bersifat afektif menyangkut ikatan emosional yang dimiliki individu terhadap sistem politik. Jadi, menyangkut *feelings* terhadap sistem politik. Sedangkan orientasi yang bersifat evaluatif menyangkut kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan bagaimanaperanan individu didalamnya.

Budaya politik yang berkembang selama ini dapat digolongkan menjadi tiga yaitu: *Pertama*, Budaya politik parokial(*parochial political culture*), yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah). *Kedua*, Budaya politik kaula(*subyek political culture*), yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif. *Ketiga*, Budaya politik partisipan(*participant political culture*), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.

4. Partisipasi Politik, Pemilihan Umum dan Pemilih Pemula

Menurut Miriam Budiardjo (Cholisin dkk, 2007:150) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum di definisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan politik. Sedangkan Herbert McClocky, menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui manamereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidal langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.Sementara itu, secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi:

- a. Partisipasi aktif yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain-lain.
- b. Partisipasi pasif yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja keputusan pemerintah.
- c. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang dicita-citakan.

Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Dengan demikian, pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercaya (Ramlan Surbakti, 1992:181).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan subjek penelitian adalah guru PKn dan siswa SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, sedangkan objek dari penelitian ini adalah peran PKn dalam menumbuhkan budaya politik siswa. Instrumen penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Data diperoleh melalui metode wawancara. Metode wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur dengan menggambarkan pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan terhadap responden. Tujuan wawancara adalah untuk melengkapi dan mengecek ulang data dan dokumentasi yang sudah ada. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka dengan cara menggali lebih dalam informasi dari responden untuk memperoleh data yang lebih mendalam. Metode dokumentasi ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen. Analisis data yang

digunakan adalah dengan menggunakan deskriptif kualitatif secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau fakta empiris dengan terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsir, dan menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pentingnya memberikan pengetahuan dan pemahaman budaya politik bagi siswa agar mereka sebagai pemilih pemula dapat menyalurkan aspirasi mereka sebagai pemilih. Selain mempelajari istilah politik dan budaya politik itu sendiri, tipe-tipe budaya politik juga tidak lupa dijelaskan dalam pengajaran budaya politik. Tipe-tipe budaya politik penting diketahui agar para peserta didik mengetahui tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat. Tipe budaya politik yang berkembang di masyarakat ada tiga tipe yaitu budaya politik parokial, kaula dan partisipan. Mengenai tipe-tipe budaya politik yang berkembang di masyarakat, sebagian besar responden mengetahui tipe-tipe budaya politik yang berkembang di masyarakat secara umum.

Salah satu contoh dari budaya politik yang diberikan oleh bapak/ibu guru di kelas dalam pengajaran budaya politik adalah pemilihan ketua OSIS. Salah satu contoh dari budaya politik yang diberikan oleh bapak/ibu guru di kelas dalam pengajaran budaya politik adalah pemilihan ketua OSIS. Mengenai contoh-contoh budaya politik, sebagian responden mengetahui contoh-contoh budaya politik di lingkungan sekolah seperti pemilihan ketua kelas dan OSIS.

Pentingnya menanamkan budaya politik partisipan kepada setiap individu yang sudah memiliki hak pilih. Dengan menanamkan budaya politik partisipan, diharapkan bisa ikut secara aktif dan kesadaran diri sendiri untuk ikut dalam suatu kegiatan pemilihan. Oleh karena itu, menanamkan sikap budaya politik partisipan terutama kepada siswa yang berusia 17 tahun sebagai pemilih pemula sangat penting dilaksanakan. Dan ini merupakan tugas guru melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk dapat menanamkan sikap budaya politik partisipan agar siswa sebagai pemilih pemula dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan dengan kesadaran mereka sendiri tanpa harus ikut-ikutan ataupun paksaan dari orang lain. Budaya politik partisipan merupakan suatu kehidupan

politik dimana masyarakat ikut berpartisipasi secara aktif dan karena kesadaran sendiri. Pengetahuan dan pemahaman tentang budaya politik terutama budaya partisipan bisa diterapkan dalam kehidupan politik yaitu saat kegiatan pemilihan. Dengan menerapkan budaya politik partisipan diharapkan dapat menekan angka golput dan partisipasi masyarakat akan semakin tinggi terhadap kegiatan politik. Para pemilih yang sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman serta penghayatan tentang budaya politik bisa menerapkan budaya politik terutama budaya politik partisipan.

Pengetahuan dan pemahaman tentang politik perlu diketahui agar bisa mengamati kehidupan politik yang berkembang dalam masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam kehidupan politik dilakukan dengan kesadaran sendiri dan tanpa paksaan dari orang lain. Kegiatan politik atau pemilihan yang dilakukan bisa diamati. Kegiatan tersebut termasuk dalam budaya politik parokial, budaya politik kaula atau budaya politik partisipan. Dilingkungan sekolah, kegiatan pemilihan seperti pemilihan ketua OSIS, ketua kelas atau ketua IPM. Dari kegiatan pemilihan tersebut siswa yang merupakan pemilih pemula bisa diamati budaya politik yang berkembang dalam kegiatan tersebut. Melalui kegiatan pemilihan ketua kelas, ketua OSIS atau ketua IPM siswa yang merupakan pemilih pemula dapat menyalurkan aspirasinya. Namun terkadang sebagai pemilih pemula, pengaruh orang lain dan ikut-ikutan masih menjadi bagian dalam kegiatan politik atau pemilihan tersebut. Kurangnya minat masyarakat dalam kegiatan politik sehingga timbul budaya politik kaula bahkan budaya politik parokial. Pengetahuan dan pemahaman tentang budaya politik yang cukup, maka diharapkan budaya politik yang berkembang adalah budaya politik partisipan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran PKn dalam menumbuhkan budaya politik siswa di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta sebagai berikut:

1. *Civic Knowledge*
 - a. Pengetahuan tentang politik

Pengetahuan siswa mengenai istilah politik sebagian besar diperoleh melalui media massa terutama televisi. Akan tetapi dari data yang diperoleh pelajaran PKn juga memiliki peran dalam memberikan pengetahuan politik kepada siswa.

b. Tipe-tipe budaya politik

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Contoh budaya politik

Budaya politik yang dipelajari oleh siswa melalui pelajaran PKn juga dikaitkan dengan pemberian contoh sehingga siswa tidak hanya mengetahui budaya politik tetapi contoh-contoh budaya politik tersebut. Dari data yang diperoleh bahwa sebagian siswa sudah memiliki pengetahuan tentang contoh-contoh budaya politik yang ada di lingkungan sekitar mereka.

2. *Civic Disposition*

a. Penanaman nilai budaya politik

Sebagai pemilih pemula, penanaman nilai-nilai budaya politik sangat perlu dilakukan. Hal ini dilakukan agar siswa sebagai pemilih dapat menyalurkan aspirasi mereka dengan benar. Dari data yang diperoleh, bahwa sebagian besar responden mengatakan bahwa nilai-nilai budaya politik yang harus ditanamkan dan dimiliki oleh para pemilih pemula adalah budaya politik partisipan. Dengan menerapkan budaya politik partisipan berarti dapat menyalurkan aspirasi mereka sesuai dengan pilihan mereka sendiri.

b. Sikap terhadap golongan putih

Siswa sebagai pemilih pemula perlu dibekali pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang politik agar tidak tergolong dalam kelompok golongan putih. Mata pelajaran PKn memiliki peran untuk hal tersebut. Dan sebagian besar responden mengatakan tidak setuju dengan adanya

golongan putih sebab hal tersebut menunjukkan kurangnya kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik ataupun budaya politik.

3. *Civic Skill*

a. Keikutsertaan dalam budaya politik

Peran serta atau ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan politik merupakan hal yang diharapkan dapat diterapkan setelah mempelajari budaya politik. Sebagian besar responden ikut terlibat dalam suatu kegiatan yang berkaitan dengan politik atau pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah menerapkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang budaya politik dalam suatu kegiatan politik atau pemilihan.

b. Menganalisis tipe budaya politik

Budaya politik yang berkembang dalam masyarakat dapat dianalisis atau dilihat dari respon atau pun minat masyarakat terhadap budaya politik. Dari data yang diperoleh, setelah mempelajari budaya politik siswa dapat menganalisis tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. (1981). *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Arif, Saiful dkk. 2007. *Budaya Politik Demokratis*. Malang: Averroes Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Cholisin. (1994). *Ilmu Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Laboratorium PMPKn IKIP Yogyakarta.
- Cholisin dkk. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: FISE & UNY Press.
- Gaffar, Afan. (2006). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2003). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.